



## KEBIJAKAN EROPA TERHADAP PENDANAAN, KURIKULUM, DAN GURU SEKOLAH ISLAM

(Studi Komparatif di Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, dan Swedia)

Nur Kholis<sup>a)</sup>, Tatag Satria Praja<sup>b)</sup>

a) UIN Sunan Ampel Surabaya

b) UIN Sunan Ampel Surabaya

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebijakan negara-negara Eropa, seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, dan Swedia, terhadap sekolah Islam. Fokus kajian mencakup tiga hal yang saling terkait, yaitu kebijakan terhadap pendanaan pendidikan, kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), dan pemberdayaan guru PAI. Data dari literatur yang relevan dikumpulkan dan dianalisis menggunakan pendekatan analitis-komparatif. Temuan inti kajian ini sebagai berikut. Pertama, berkaitan dengan pendanaan, Belanda dan Swedia mendanai semua sekolah Islam; Inggris dan Prancis hanya mendanai sekolah Islam yang benar-benar mengikuti peraturan pendidikan nasional; dan Jerman mendanai hanya gaji guru PAI. Kedua, untuk kebijakan kurikulum, Jerman dan Inggris memasukkan PAI di sekolah umum; Belanda dan Swedia meyerahkan kurikulum PAI kepada masing-masing sekolah Islam; sedangkan Prancis mengintegrasikan PAI ke dalam matapelajaran lain di sekolah publik. Ketiga, berkaitan dengan guru, Belanda mewajibkan guru PAI mengikuti pelatihan keguruan bersertifikat di universitas; Inggris dan Swedia mewajibkan mereka mengambil kursus ilmu pendidikan setingkat pascasarjana; Prancis mengharuskan mereka mengambil matakuliah yang memuat topik agama; dan Jerman mewajibkan mereka mengambil kuliah teologi Islam.

### ABSTRACT

This study aims to reveal the policies of European countries, such as the Netherlands, Britain, Germany, France and Sweden, towards Islamic schools. The focus of the study includes three interrelated themes, namely policies on education funding, Islamic Religious Education (IRE) curriculum, and empowerment of IRE teachers. Data from relevant literature were collected and analyzed using an analytical-comparative approach. The main findings of this study are as follows. First, with regard to funding, the Netherlands and Sweden fund all Islamic schools; Britain and France only fund Islamic schools that follow national education regulations; and Germany funds only IRE teacher salaries. Second, for the curriculum policy, Germany and the UK include IRE in public schools; The Netherlands and Sweden leave the IRE curriculum to each Islamic school; while France integrates IRE into other subjects in public schools. Third, with regard to teachers, the Netherlands requires IRE teachers to undertake certified teacher training at universities; England and Sweden require that they take postgraduate-level education courses; France requires that they take courses containing religious topics; and Germany requires them to take Islamic theology courses.

### KATA KUNCI

Studi Komparatif; Eropa;  
Kebijakan; Sekolah Islam.

### KEYWORDS

Comparative Study; Europe;  
Policy; Islamic Schools.

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan jati diri dan penciri utama kemajuan sebuah bangsa. Peradaban kaum Muslim pernah menjadi puncak peradaban dunia pada zaman keemasan Islam abad VII hingga XIII, tidak lain karena zaman keemasan pendidikan Islam. Sejarah mencatat nama-nama intelektual muslim terkenal. Mereka adalah alumni lembaga pendidikan Islam. Baik karya, nama, pemikiran, dan ide brilian mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan dunia, seperti: Ibnu Sina dalam bidang kedokteran dan Al-Khwarizmi bidang matematika.<sup>1</sup> Tetapi masa itu tinggal sebuah sejarah. Bangsa-bangsa Eropa kini menjadi pemimpin dunia dalam kemajuan IPTEK, setelah masa kemunduran peradaban Islam.<sup>2</sup> Saat ini, Eropa telah menjadi pusat industri dunia, dengan lahirnya revolusi industri pertama di Inggris pada abad ke-17 dan sekarang telah berkembang menjadi revolusi industri 4.0.<sup>3</sup>

Di banyak negara Eropa, Muslim merupakan kelompok minoritas, tetapi semakin menarik perhatian bagi akademisi dan kalangan awam. Studi-studi tentang minoritas muslim menunjukkan peningkatan, terutama setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika dan peristiwa yang terjadi di beberapa negara Eropa, seperti Inggris dan Spanyol.<sup>4</sup> Peristiwa ini seringkali dikaitkan dengan kelompok Muslim tertentu, terutama yang dikategorikan sebagai Muslim radikal dan fundamentalis. Bahkan gelombang Islamofobia bermunculan di beberapa negara Eropa.<sup>5</sup> Akibatnya, Islam dan kaum Muslim di dunia menjadi sorotan dan perhatian bagi para pengambil kebijakan politik di negara-negara Eropa.<sup>6</sup>

Di beberapa negara Eropa, seperti: Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, dan Swedia persebaran populasi Muslim cukup tinggi, bahkan jumlahnya diperkirakan meningkat dua kali lipat atau lebih. Komposisi penduduk Muslim dan sarana ibadah di negara-negara tersebut meningkat pula.<sup>7</sup> Pada tahun 2015 populasi Muslim dunia mencapai 24.1 persen dan diperkirakan akan mencapai 32% pada satu dekade berikutnya. Ini karena penduduk muslim memiliki tingkat kesuburan cukup tinggi.<sup>8</sup> Pergeseran demografi ini telah menyebabkan pergolakan politik dan sosial di Eropa, terutama setelah kedatangan jutaan para pencari suaka yang kebanyakan adalah Muslim.<sup>9</sup>

---

<sup>1</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 306.

<sup>2</sup> Jorgen S. Nelsen, *Muslims in Western Europe, Second Edition* (England: Edinburgh University Press, 1995), 45.

<sup>3</sup> Nancy W. Gleason, *Higher Education In The Era Of The Fourth Industrial Evolution* (Singapore: Springer Nature Singapore Ltd, 2018), 2–4.

<sup>4</sup> Jonathan Birt, *Good Iman, Bad Iman: Civic Religion and National Integration in Britain Post 9/11* (London: The Muslim World, 2006), 2–7.

<sup>5</sup> EUMC, *Muslims In The European Union Discrimination and Islamophobia* (Austria: Manz Crossmedia, 2006), 36-39.

<sup>6</sup> Ahmad Nur Fuad, *Minoritas Muslim Di Negara-Negara Non Muslim* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4.

<sup>7</sup> poskotanews.com, "Pertumbuhan Muslim Di Eropa Meningkat Dua Kali Lipat," last modified March 7, 2018, accessed November 13, 2018, [https:// http://poskotanews.com/2018/03/07/pertumbuhan-muslim-di-eropa-meningkat-dua-kali-lipat](https://http://poskotanews.com/2018/03/07/pertumbuhan-muslim-di-eropa-meningkat-dua-kali-lipat).

<sup>8</sup> Michael Lipka and Conrad Hackett, "Why Muslims Are the World's Fastest-Growing Religious Group," *Pew Research Center*, last modified April 6, 2017, accessed September 7, 2018, <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group/>.

<sup>9</sup> Wilfred C. Smith, *Islam in Modern History* (New Jersey: Princeton University, 1957), 258.

Pergeseran demografis ini telah memunculkan diskusi-diskusi dan wacana mengenai penyediaan pendidikan Islam bagi anak-anak Muslim, misalnya sekolah-sekolah Muslim, masjid, dan organisasi Islam, karena pendidikan agama adalah tujuan penting bagi kaum Muslim.<sup>10</sup> Banyak pemuda Muslim dan bahkan orang dewasa menghadiri kelas-kelas Islam yang dikelola secara privat dan berbentuk ekstrakurikuler. Banyak anak-anak Muslim bersekolah di sekolah Islam swasta ataupun belajar di rumah.<sup>11</sup> Program pendidikan Islam yang didanai dan disediakan oleh negara adalah pilihan yang muncul di beberapa negara Eropa. Program ini tidak hanya menjadi perdebatan terkait kebebasan beragama, persamaan hak atas pendidikan, dan integrasi, tetapi juga terkait masalah keamanan dan kontrol negara terhadap Islam.<sup>12</sup>

Kajian tentang Muslim dan lembaga pendidikan (sekolah) Islam di Eropa memberikan pemahaman bahwa Islam telah semakin subur di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Pemahaman ini berdampak positif bagi masyarakat non-Eropa, misalnya, untuk menjadikannya sebagai pendidikan bagi anak-anaknya. Adanya dukungan kebijakan pemerintah negara-negara Eropa terhadap pendidikan Islam dapat mengurangi sentimen negatif antar masyarakat berbasis keagamaan. Beberapa penelitian terkait dengan pendidikan agama Islam di negara-negara Eropa lebih berfokus pada materi dan proses pembelajaran pendidikan Islam di lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid. Kajian komprehensif tentang bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di negara-negara Eropa belum banyak dilakukan.

Oleh karena itu artikel ini berupaya mengungkap kebijakan negara-negara Eropa terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Secara spesifik artikel ini membahas bagaimana negara-negara Eropa menyediakan dana untuk sekolah Islam, menerapkan kebijakan terhadap kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), dan memberdayakan guru-guru PAI. Untuk mendapatkan deskripsi yang lebih komprehensif, kajian ini menggunakan pendekatan analitis komparatif terkait kebijakan sekolah Islam di lima negara Eropa yaitu meliputi Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, dan Swedia. Artikel ini diharapkan dapat menambah literatur dan memperluas pemahaman khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah negara-negara Eropa terhadap pelaksanaan pendidikan Islam.

## B. Muslim di Negara-Negara Eropa

Muslim di Belanda ada sejak Perang Dunia II. Kelompok imigran yang cukup besar berasal dari negara bekas koloni, imigran buruh, dan pengungsi (pencari suaka), dan sebagian adalah imigran dari negara-negara Islam di Asia dan Afrika. Muslim di Belanda mencapai satu juta lebih atau sekitar 6%

<sup>10</sup> Ednan Aslan, *Islamic Education in Europe* (Vienna: Bohlau Verlag, 2009), 11–13.

<sup>11</sup> Paul Josza, *Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates* (Munster: Waxman, 2007), 67–68.

<sup>12</sup> Robert Hefner and Muhammad Qasim, *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education* (New Jersey: Princeton University Press, 2007), 224–241.

dari total populasi Belanda, tersebar di berbagai kota.<sup>13</sup> Di kota-kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, dan Utrecht, lebih dari 10% penduduknya adalah Muslim. Mayoritas Muslim Belanda berasal dari Turki dan Maroko, masing-masing berjumlah 320.000 dan 285.000.<sup>14</sup> Orang Turki dan Maroko pertama datang ke Belanda pada 1960-an, sebagai pekerja tamu. Mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah, karena jumlahnya yang semakin meningkat, Muslim di Belanda mendirikan beberapa lembaga pendidikan Islam di masjid.<sup>15</sup>

Pada 2018 populasi Muslim di Inggris sekitar 3,4 juta atau sekitar 5,2 persen dari penduduk Inggris.<sup>16</sup> Data 2011 menunjukkan bahwa mayoritas mereka berasal dari negara jajahannya, sekitar tiga perempat memiliki latar belakang etnis Asia Selatan, khususnya Pakistan (43%), Bangladesh (17%), dan India (9%).<sup>17</sup> Gereja Anglikan Inggris memainkan peran utama dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk menyeimbangkan hak-hak historisnya, sebuah sistem kompensasi telah diciptakan untuk memberikan kesamaan bagi minoritas agama untuk berkembang.<sup>18</sup> Di Inggris, pendidikan adalah wilayah dimana penganut agama minoritas semakin terlibat di dalamnya. *Rushdie Affair* pada tahun 1989 merupakan peristiwa yang penting dalam diskusi publik tentang multikulturalisme dan Islam di Inggris.<sup>19</sup>

Muslim di Jerman banyak berasal dari imigran yang bekerja di sana, mereka disebut sebagai pekerja tamu, dan diharapkan untuk kembali ke negara asal dengan keahlian yang telah didapatkan selama bekerja di Jerman.<sup>20</sup> Populasi Muslim Jerman saat ini berjumlah sekitar 4,9 juta, atau 5,9% dari total populasi Jerman. Dua pertiga populasi Muslim di Jerman berasal dari negara Turki, setengahnya telah memperoleh kewarganegaraan Jerman, dan sepertiganya merupakan kelahiran Jerman.<sup>21</sup> Jerman adalah federasi yang terdiri dari 16 negara, dimana masing-masing memiliki tanggung jawab individu untuk pendidikan.<sup>22</sup> Jerman merupakan negara sekuler, tetapi memiliki sikap untuk mendukung

---

<sup>13</sup> Johan Mauleman, *Islamic and Education in the Netherlands* (Munster: Waxmann, 2009), 13–15.

<sup>14</sup> Geert Driessen Michael S., "Islamic School in the Netherlands: Expansion or Marginalization?" *Journal of Interchange*, Vol. 37," *Springer* 37, no. 03 (2006).

<sup>15</sup> P. S. van Koningsveld, *The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe* (Kampen: Kok Pharos Pub. House, 1991), 20.

<sup>16</sup> Office for National Statistics, "Muslim Population in the UK," accessed November 7, 2018, <https://www.ons.gov.uk/aboutus/transparencyandgovernance/freedomofinformationfoi/muslimpopulationintheuk>.

<sup>17</sup> Cardiff University, "Muslim Ethnicities," *Centre for the Study of Islam in the UK*, December 2, 2015, accessed October 7, 2018, <https://sites.cardiff.ac.uk/islamukcentre/rera/online-teaching-resources/muslims-in-britain-online-course/module-3-communities/diversities/muslim-ethnicities/>.

<sup>18</sup> J. Mark Halstead, "Islamic Education in the United Kingdom," in *Islamic Education in Europe*, ed. Aslan Ednan (Vienna: Bohlau Verlag, 2009), 179.

<sup>19</sup> Ron Geaves, "Negotiating British Citizenship and Muslim Identity," in *Muslim Britain Communities under Pressure*, ed. Tahir Abbas (London: Zed Books, 2005).

<sup>20</sup> Mathias Rohe, *The Legal Treatment of Muslims in Germany* (Germany: Leuven Peters, 2004), 83.

<sup>21</sup> Aysun Yasar, *Islamic Instruction at Public Schools in Germany: Expectations and Challenges* (Frankfurt: Peter Lang, 2013), 127.

<sup>22</sup> Peter Schreiner, "Religious Education in Germany," in *Religious Education in Europe: Situation and Current Trends in Schools*, ed. E. Kuyk (Oslo: IKO - Publishing House, 2007), 81–82.

agama. Negara dapat mengadakan kerjasama dengan asosiasi keagamaan manapun, jika mereka telah diklasifikasikan sebagai komunitas keagamaan resmi.<sup>23</sup>

Muslim di Prancis memiliki populasi sekitar 5,1 juta jiwa atau 8,2 persen dari populasi penduduknya.<sup>24</sup> Migrasi muslim dimulai pada abad ke-19, dengan banyak imigran yang berasal dari negara jajahan Prancis. Sejarah kolonial Prancis di negara yang didominasi oleh Muslim telah menghasilkan perlakuan Islam yang dianggap istimewa atas agama minoritas lainnya.<sup>25</sup> Prancis adalah negara republik sekuler dengan sistem hukum, sejak tahun 1905 terjadi pemisahan dalam urusan agama dan Undang-Undang Negara. Sementara pemisahan yang ketat antara agama dan negara adalah prinsip penting yang mengatur semua agama, walaupun dalam praktiknya terdapat beberapa modifikasi.<sup>26</sup> Model integrasi republik Prancis telah digambarkan sebagai kewarganegaraan dan asimilasi, berarti warga negara diharapkan secara sukarela mengakui nilai-nilai egaliter bangsa dan mengekspresikan perbedaan budaya dan agama apapun secara pribadi, karena tidak memiliki legitimasi politik di ruang publik.<sup>27</sup>

Muslim di Swedia berjumlah sekitar 4,5 juta orang atau 30 persen dari jumlah penduduknya. Kebanyakan merupakan pekerja imigran dan pencari suaka dari Iran, Irak, pengungsi Suriah, dan korban peperangan di Bosnia.<sup>28</sup> Imigrasi Muslim terjadi pada tahun 1950-an, 1960-an, dan berlanjut tahun 1980-an dengan kebijakan pengungsi liberal. Kebijakan pengungsi Swedia telah diperketat sampai batas tertentu, tetapi tahun 2013 Swedia menerima banyak pengungsi dibandingkan negara-negara lain di Eropa.<sup>29</sup> Di Swedia terdapat program kesejahteraan sosial bagi organisasi keagamaan, sehingga dapat memperoleh dana dari negara untuk kegiatan yang mereka adakan.<sup>30</sup>

### C. Kebijakan Sekolah Islam di Eropa

Meskipun berkoonotasi religius istilah “sekolah Islam” digunakan untuk mencakup pendidikan agama dan sekuler tentang Islam. Artikel ini menggunakannya sebagai istilah yang luas, mencakup: 1) pengajaran Islam yang disediakan di masjid, organisasi Muslim, dan rumah-rumah Muslim, 2) Pendidikan Agama Islam sebagai subjek di sekolah umum, dan 3) lembaga yang mengajarkan tentang

<sup>23</sup> Rohe, *The Legal Treatment of Muslims in Germany*, 87.

<sup>24</sup> Jonathan Laurence and Justin Vaisse, *Integrating Islam: Political and Religious Challenges in Contemporary France* (France: Brookings Institution Press, 2007), 31.

<sup>25</sup> Joselyne Casari, *When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States* (New York: Plgrave Macmillan, 2004), 23.

<sup>26</sup> Brigitte Basdevant, *Islam in France, in the Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe* (Lauven: Peeters, 2004), 59.

<sup>27</sup> Jacques Barou, “Integration of Imigrant in France: A Historical Perspective,” *Identities: Global Studies in Culture and Power* 21, no. 6 (February 5, 2014): 643.

<sup>28</sup> Choirul Aminuddin, “Populasi Muslim Swedia Paling Tinggi Di Eropa,” *Tempo.Co*, last modified December 3, 2017, accessed September 7, 2018, <https://dunia.tempo.co/read/1039128/populasi-muslim-swedia-paling-tinggi-di-eropa>.

<sup>29</sup> Karin Borevi, “Multiculturalism and Welfare State Integration: Swedish Model Path Dependency,” *Journal Global Studies in Culture and Power* 21, no. 6 (2014): 115–117.

<sup>30</sup> Ulrika Martensson, “Public Islam and the Nordic Welfare State: Changing Realities?” *Journal Tidsskrift for Islamforskning* 8, no. 1 (2014): 4.

Islam, baik lembaga Muslim maupun non-Muslim.<sup>31</sup> Sekolah-sekolah Islam telah didirikan di banyak negara Eropa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, dan Swedia. Berikut dipaparkan bagaimana kebijakan sekolah Islam di lima negara Eropa ini, khususnya berkaitan dengan pendanaan pendidikan, kurikulum PAI, dan pemberdayaan guru PAI.

### **Belanda**

Sekolah dasar Muslim pertama Belanda dibuka di Rotterdam tahun 1998. Sekarang terdapat empat puluh tiga sekolah dasar Muslim dan satu sekolah menengah. Semua sekolah ini didanai negara dengan syarat harus memenuhi semua standar pendidikan. Negara mendanai pendidikan agama di sekolah umum sejak tahun 2008.<sup>32</sup> Sekolah menerima 6100 Euro per anak setiap tahun, dan dapat meminta biaya tambahan dari para orang tua untuk kegiatan ekstrakurikuler. Pendanaan pemerintah tersedia juga untuk kegiatan luar sekolah, seperti di *Ibn Sina School* Rotterdam. Hanya terdapat 25% sekolah di Belanda yang dikelola oleh negara. Selebihnya dikelola secara pribadi tetapi didanai negara, dan sebagian menawarkan pendidikan keagamaan. Sebagian orang tua Muslim memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah Kristen, karena menyediakan pendidikan lebih tinggi.<sup>33</sup> Adapun Prinsip konstitusional yang mengatur pendanaan terkait PAI, yaitu: non-diskriminasi, kebebasan beragama dan pendidikan (termasuk pendirian lembaga).

Pemerintah Belanda tidak menerapkan kebijakan berkaitan dengan kurikulum PAI. Setiap sekolah diberi kebebasan untuk merumuskan dan mengajarkan kurikulum PAI. Seringkali siswa belajar surat (ayat-ayat Al-Qur'an), Pilar Islam, serta cerita keagamaan yang mengajarkan nilai-nilai moral. Di *Ibnu Sina School* beberapa orang tua kadang memiliki pendapat yang kuat tentang isi PAI dan beragam penafsiran yang berkaitan dengan musik serta aturan dalam berpakaian. Berbagai buku sekolah berbahasa Belanda terkait PAI tersedia, buku tersebut ditulis menggunakan gambar anak-anak Muslim Belanda, tujuannya untuk melibatkan anak-anak Muslim agar bisa tumbuh dalam masyarakat Belanda. Sebuah penerbit swasta yang dikelola the *Islamitische Scholen Besturen Organisatie* (ISBO) atau Organisasi Dewan Sekolah Islam menjual buku-buku ini.<sup>34</sup>

Belanda merupakan salah satu negara pertama yang menawarkan pelatihan guru PAI. Karena menawarkan PAI dalam sistem sekolah, Belanda membangun program akademis untuk melatih para guru PAI. Belanda telah menjadikan PAI sebagai bagian yang diterima masyarakat akademik.<sup>35</sup> Sejak tahun 1995 hingga sekarang, guru PAI di Belanda telah menerima pelatihan PAI di *Inholland University of Applied Sciences*, dan juga telah menawarkan pelatihan untuk imam dan pekerja spiritual Islam sejak tahun 2006. Tahun 2014, *Inholland University* memperkenalkan *Diploma Islamitisch Onderwijs* (DIO)

---

<sup>31</sup> Susan L. Douglass and Munir A. Shaikh, "Defining Islamic Education: Differentiation and Applications," *Current Issues in Comparative Education* 7, no. 1 (Desember 2004): 5–18.

<sup>32</sup> Muhammad Nabel, "Schooling Options for Muslim Children Living in Muslim Minority Countries," *Journal of Social Science and Humanities Research* 3, no. 4 (2015): 23–26.

<sup>33</sup> Ina Avest, *Religion and Education in the Dutch and Post Pillarized Educational System* (Munster: Waxmann, 2007), 7.

<sup>34</sup> Rietveld Van Wingerden, *Islam in Education in the Netherlands* (Munster: Waxmann, 2010), 21.

<sup>35</sup> Wilna A.J. Meijer, *Tradition and Future of Islamic Education* (Munster: Waxmann, 2009), 56.

yaitu kursus pendidikan berkelanjutan bagi para guru di sekolah Islam dari semua mata pelajaran. DIO bertujuan melatih guru Muslim dan non-Muslim tentang karakter, sehingga meningkatkan kinerja. *Amsterdam University* merupakan perguruan tinggi swasta Protestan yang telah membuka Pusat Teologi Islam pada tahun 2005 dan *Leiden University* juga mengembangkan sebuah program studi Teologi Islam. Semua inisiatif ini telah menerima dukungan keuangan dari negara.<sup>36</sup>

### **Inggris**

Hingga saat ini, lebih dari seratus sekolah Islam di Inggris, tetapi hanya beberapa yang didanai oleh negara, karena mengharuskan sekolah mengikuti kurikulum nasional serta mempekerjakan guru berkualitas.<sup>37</sup> Beberapa sarjana Inggris menemukan bahwa sekolah keagamaan (Islam) dipandang sebagai cara untuk melindungi identitas mereka. Dalam sebuah studi tentang transisi sekolah Islam swasta menjadi negeri, menunjukkan bahwa ketika sekolah swasta didanai negara, maka akan mulai mengalami tekanan, baik formal maupun informal dari lembaga negara dan masyarakat sekitarnya.<sup>38</sup>

Meskipun hanya sekolah yang didanai negara yang diminta mengikuti kurikulum nasional, banyak juga sekolah yang tidak didanai memilih untuk mengikutinya, sebagian besar untuk mempersiapkan siswa mereka dalam ujian nasional.<sup>39</sup> Kebijakan integrasi Inggris secara historis didasarkan kepada penilaian, keragaman budaya dan multikulturalisme, sehingga sekolah Islam, lembaga agama, dan organisasi sosial sekarang memiliki kemungkinan besar untuk menerima pendanaan negara, seperti pada kelompok Kristen dan Yahudi.<sup>40</sup>

Kurikulum PAI di London memberikan contoh tentang bagaimana dilema dapat dinegosiasikan, yaitu menyanyikan banyak lagu dengan lirik Islami, dan mengajarkan anak seni kaligrafi, kemudian dalam sains dengan memasukkan para astronom, matematikawan, dan dokter Muslim. Ofsted (Kantor Standar Pendidikan, Layanan dan Keterampilan Anak-Anak di Inggris) juga memeriksa sekolah-sekolah Islam bersama dengan semua sekolah lain di Inggris dan menerbitkan hasilnya di laman *web Ofsted*.<sup>41</sup> Islamia adalah sekolah terkenal di Inggris dan sekolah dasar mereka adalah sekolah Islam pertama penerima dana dari negara. Mereka menggunakan kurikulum Nasional yang dikembangkan dengan nilai-nilai Al-Qur'an, bahasa Arab, dan Studi Islam. Walaupun sekolah Islam yang didanai negara harus

<sup>36</sup> Johan Meuleman, "Islam and Education in the Netherlands," in *Islamic Education in Secular Societies*, ed. Ednan Aslan and Margaret Rausch (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013), 143–161.

<sup>37</sup> Peter Mandavile, *Islamic Education in Britain* (Boston: Brill, 2004), 228–229.

<sup>38</sup> Damian Breen, *State Funded Muslim Schools: Stakeholders and Legitimacy in the UK Context* (Abingdon: Routledge, 2013), 28.

<sup>39</sup> Mandavile, *Islamic Education in Britain*, 231.

<sup>40</sup> Suardi Wekke and Ambo Tang, "Kultur Pendidikan Islam Di Minoritas Muslim Inggris," *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 17, no. 1 (June 2, 2016), accessed October 7, 2018, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/1081/750>.

<sup>41</sup> Shiraz Thobani, *Vision in the National Curriculum: Muslim History in the British Education Context* (London: Tauris, 2010).

tetap pada kurikulum nasional, tetapi mereka masih memiliki kebebasan menyajikan materi PAI dalam berbagai interpretasi.<sup>42</sup>

Di sekolah dasar, biasanya terdapat satu guru kelas yang mengajar agama. Di tingkat menengah, kebanyakan sekolah memiliki setidaknya satu guru spesialis (agama). Semua guru dipekerjakan oleh sekolah dan dibayar oleh otoritas lokal. Terdapat berbagai kursus guru agama, seperti: kursus Sertifikat Pascasarjana dalam Pendidikan, Sertifikat Pendidikan Sekunder, dan Sertifikat Pendidikan Lanjutan. Agama terikat oleh rezim, kecuali di sekolah yang bercirikan agama, dimana inspeksi adalah tanggung jawab dari kelompok agama yang menjalankan sekolah tersebut.<sup>43</sup> Ofsted menyatakan kualitas umum pendidikan agama tetap tidak memadai dengan tingkat pendidikan yang berbeda antar sekolah. Salah satu masalahnya adalah sangat minimnya pelatihan bagi guru, karena hanya 36 persen guru baru yang mengikuti pelatihan.<sup>44</sup>

### **Jerman**

Konstitusi Jerman memberi hak para orang tua untuk mendidik anak mereka sesuai tradisi agama yang diikuti. Untuk mempertahankan netralitas agama, negara bertanggung jawab menyediakan ruang bagi pengajaran agama, karena negara sendiri dilarang mencampuri urusan agama dan sekulerisme merupakan prinsip utama Jerman. Di Jerman pendidikan agama mendapatkan porsi dua jam per minggunya.<sup>45</sup> Perdebatan terkait integrasi di Jerman didominasi oleh isu Islam dan hak-hak Muslim, misalnya, dengan mengenakan jilbab di lembaga publik, seperti sekolah. Kepentingan Jerman baru-baru ini terkait PAI di sekolah, umumnya ditafsirkan sebagai sarana mengendalikan komunitas Muslim.<sup>46</sup> Di Jerman memungkinkan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum dalam kemitraan dengan komunitas agama yang diakui negara. Namun hanya terdapat 2 organisasi Muslim yang diakui. Salah satunya adalah *Alevi*, yang dipengaruhi Islam *Syi'ah*, Sufisme, dan Kristen Nestorian. Meskipun pemerintah mengizinkan pendidikan agama di sekolah umum, tetapi hanya terdapat beberapa sekolah yang telah mencapai kesepakatan dengan organisasi Muslim resmi, karena sekolah Islam swasta dapat dibuka di Jerman sesuai konstitusi.<sup>47</sup> PAI telah diselenggarakan di *Baden Wuttemberg, Bavaria, Schleswig Holstein, Rhineland Palatinate, North, Rhine Lower, dan Saxony Westphalia*. Di kota-kota ini, lebih banyak mengajarkan tentang budaya dan sejarah Islam. Menurut Sarikaya, alasan utamanya adalah tidak adanya komunitas Islam resmi yang diakui.<sup>48</sup>

---

<sup>42</sup> Christopher Bagley and Nader Al-Refai, "Citizenship Education: A Study of Muslim Students in Ten Islamic and State Secondary Schools in Britain," in *Reforms in Islamic Education: International Perspectives*, ed. Charlene Tan (London: Bloomsbury Academic, 2014), 53–56.

<sup>43</sup> Luce Pepin, *Teaching About Religions in European School Systems: Policy Issues and Trends* (London: Alliance Publishing Trust, 2009), 32.

<sup>44</sup> Halstead, "Islamic Education in the United Kingdom," 54–55.

<sup>45</sup> Yasar, *Islamic Instruction at Public Schools in Germany: Expectations and Challenges*, 131–132.

<sup>46</sup> Schreiner, "Religious Education in Germany," 63–64.

<sup>47</sup> Nabel, "Schooling Options for Muslim Children Living in Muslim Minority Countries," 23–26.

<sup>48</sup> Yasar Sarikaya, *Islamic Religious Education in Germany: Curriculum and Textbooks* (Frankfurt: Peter Lang, 2011), 41.



Pemerintah Jerman mendanai empat Universitas yang menawarkan teologi Islam, yaitu: *Munster-Osnabruck, Frankfurt-Greissen, Tubingen, dan Nuremberg-Erlangen*. Para guru PAI menerima pelatihan di pusat-pusat ini. Banyak Muslim di Jerman merasa ambivalen tentang peran negara Jerman dalam PAI dan teologi Islam. Di sisi lain, para orang tua puas bahwa anak-anak Muslim memiliki pilihan untuk belajar tentang Islam di sekolah, sama seperti anak-anak Katolik dan Protestan.<sup>49</sup> Kementerian Pendidikan di Jerman, telah menyatakan bahwa ingin menutup kesenjangan akademis dan memungkinkan pendekatan historis-kritis terhadap Al-Qur'an. Selain itu, guru Muslimah diperbolehkan mengenakan jilbab di sekolah, ketika sedang mengajar PAI. Mayoritas yang mempelajari teologi Islam di Jerman adalah wanita Muslimah yang mengenakan jilbab.<sup>50</sup>

### **Prancis**

Islamophobia mendapatkan tempat di Prancis, sebagian besar upaya legislatif untuk membatasi ekspresi dan praktik Muslim belum berhasil, termasuk di kampus, tempat kerja, serta memblokir program halal dalam makan siang di sekolah.<sup>51</sup> Selain itu, sekolah swasta dapat dibuka secara hukum, namun jumlahnya sangat terbatas, karena dikenakan biaya yang tinggi.<sup>52</sup> Terdapat tiga jenis sekolah di Prancis, yaitu: sekolah umum, Katolik (disubsidi negara), dan swasta. Di sekolah umum, tampilan simbol agama di fasilitas sekolah sangat dilarang, seperti: jilbab, kipa atau salib besar. Larangan ini sebagaimana undang-undang tahun 2004, menyatakan bahwa pakaian dan simbol agama memanasifestasikan afiliasi keagamaan siswa di sekolah negeri tidak diperbolehkan. Akhirnya, sebagian sekolah Muslim yang dikelola swasta berada di bawah kewenangan negara, berarti mereka menerima dana negara untuk gaji para guru, dengan konsekuensi mengikuti kurikulum nasional. Sekolah juga harus berfungsi selama lima tahun agar mendapatkan pendanaan negara. Sekolah Tinggi *Averroes* merupakan salah satu sekolah Muslim yang menarik banyak perhatian ketika menerima peringkat teratas di Prancis.<sup>53</sup>

Meskipun PAI tidak diajarkan dalam sistem sekolah yang didanai publik Prancis, orang tua yang menginginkan anaknya belajar tentang Islam di luar rumah, mengirim anak-anaknya ke kelas siang atau akhir pekan yang disediakan oleh masjid dan organisasi Islam swasta. Meskipun pendidikan agama di Prancis bukan mata pelajaran sekolah yang terpisah, pendidikan tentang agama kini telah dimasukkan dalam mata pelajaran sejarah dan filsafat. Subjek ini, membahas kontribusi agama terhadap peradaban daripada ritual dan keyakinan agama saja. Misalnya, agama Islam dianggap sangat penting secara historis bagi perkembangan Mediterania, karena kemajuannya dalam bidang *al-jabar*,

<sup>49</sup> Yasar, *Islamic Instruction at Public Schools in Germany: Expectations and Challenges*, 29–31.

<sup>50</sup> Rohe, *The Legal Treatment of Muslims in Germany*, 36.

<sup>51</sup> Velinger Beraud, *Religion and Education in the France and Spanish* (France: Distant Cousins, 2008), 87.

<sup>52</sup> Muhammad Nabel, "Schooling Options for Muslim Children Living in Muslim Minority Countries."

<sup>53</sup> Brigitte Basdevant, *Islam in France, in the Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe* (Lauven: Peeters, 2004), 74-76.

astronomi, kedokteran, geografi, dan pertanian, serta kontribusinya terhadap kemajuan artistik dan pemikiran ilmiah.<sup>54</sup>

Banyak guru menganggap pengajaran tentang Islam sulit, karena kurangnya pendidikan dan persepsi negatif tentang Islam di masyarakat Prancis. Seorang guru telah menyampaikan kesulitan ini, sebagai berikut: “Ketika saya mengatakan sesuatu tentang Islam selalu ada murid yang mengatakan itu tidak benar. Saya tidak tahu apa yang benar, karena Saya dilatih sebagai guru sejarah, bukan agama,” yang paling mudah adalah menghindari berbicara tentang agama, dan khususnya Islam. Sementara guru dapat mengambil mata kuliah pilihan tentang topik agama, karena pelatihan guru hanya sedikit mengajarkan agama. Baru-baru ini Prancis berusaha meningkatkan pendidikan guru dengan memasukkan pengajaran agama, ini menunjukkan adanya pergeseran untuk mengakui pentingnya guru berlatar belakang studi agama.<sup>55</sup>

### **Swedia**

Pendidikan agama Islam yang didanai publik hanya diajarkan di sekolah Islam, karena tidak ada PAI di sekolah Swedia, kecuali sekolah-sekolah yang berorientasi Muslim.<sup>56</sup> Setiap sekolah Muslim di Swedia mendidik antara 20 sampai 75 murid. Swedia tidak memiliki tradisi sekolah berdasarkan jenis kelamin. Dalam berpakaian, sekolah merekomendasikan pakaian sederhana, yaitu rok atau celana yang tidak terlalu pendek dan atasan yang tidak terbuka. Meskipun jilbab tidak diperlukan di sekolah-sekolah seperti ini, tetapi beberapa Muslimah dewasa memakainya. Sekolah Muslim Swedia termasuk dalam kategori sekolah independen (*free school*). Sekolah-sekolah seperti itu, sepenuhnya dibiayai negara dan harus memiliki tujuan pendidikan yang sama dan kurikulum dasar sebagaimana sekolah umum, meskipun mereka diizinkan untuk memiliki profil yang jelas sebagai sekolah Muslim dengan pelajaran PAI 1-3 jam per minggunya.<sup>57</sup>

Tidak ada silabus nasional untuk PAI, setiap sekolah bertanggung jawab untuk menyiapkan silabusnya sendiri. Namun, silabus PAI lokal ini harus dirumuskan dengan cara menganut nilai-nilai mendasar yang ditetapkan dalam kurikulum nasional. Pelajaran PAI 1-3 jam per minggu yang diajarkan di sekolah-sekolah Muslim sering terdiri dari kombinasi studi Al-Qur'an, sejarah Islam, dan lagu-lagu yang terkait dengan Islam. Sisa dari jadwal umum masing-masing sekolah terdiri dari mata pelajaran standar yang ditentukan oleh silabus nasional Swedia. Di beberapa sekolah, pengajian Al-Qur'an diajarkan sebagai bagian dari PAI. Variasi dari konten PAI di berbagai sekolah dapat dikaitkan dengan tradisi interpretatif, pendidikan guru, bahan ajar, populasi siswa, dan pandangan mayoritas

---

<sup>54</sup> Werner Schiffauer et.al., *Civil Enculturation, Nation-State, School and Ethnic Difference in Four European Countries* (Oxford: Berghan Books, 2004), 88–89.

<sup>55</sup> Basdevant, *Islam in France, in the Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, 72-75.

<sup>56</sup> Muhammad Nabel, “Schooling Options for Muslim Children Living in Muslim Minority Countries.”

<sup>57</sup> Jonas Otterbeck, “What Is a Reasonable Demand? Islamic in Swedish Textbooks,” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 1, no. 4 (2005): 795–812.

masyarakat.<sup>58</sup> Saat ini belum tersedia bahan ajar berbahasa Swedia untuk PAI, berarti sebagian besar guru mengimpor buku dari negara mayoritas Muslim, tetapi beberapa guru berusaha membuat bahan ajar sendiri.<sup>59</sup>

Swedia belum memiliki program yang tersedia untuk pelatihan sistematis bagi para guru PAI. Banyak guru PAI menerima pendidikan Islam yang lebih tinggi di negara-negara yang mayoritas Muslim. Namun, menurut Badan Nasional Pendidikan Swedia, guru tersebut tidak cukup memenuhi syarat akreditasi formal, dan ini sesuatu masalah. Karena baik teologi Islam maupun pedagogi Islam tidak ditawarkan oleh universitas di Swedia. Cara sederhana mengatasi masalah ini adalah menggabungkan kursus Islam yang diambil di universitas asing dengan kursus ilmu pendidikan dari universitas Swedia, karena penggabungan kedua bagian ini akan membuat guru PAI terakreditasi penuh.<sup>60</sup>

#### D. Pembahasan

Lima negara Eropa yang menjadi sampel kajian ini memiliki kebijakan yang beragam dalam hal dana pendidikan, kurikulum PAI, dan guru PAI, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1. Pada dasarnya pemerintah lima negara memberikan dana pendidikan untuk sekolah Islam dan atau pendidikan Agama Islam dengan pola kebijakan masing-masing. Belanda dan Swedia mendanai semua sekolah Islam layaknya sekolah-sekolah lainnya. Inggris dan Prancis hanya mendanai sekolah Islam yang benar-benar telah mengikuti peraturan pendidikan nasional. Sedangkan Jerman tidak mendanai sekolah Islam, tetapi hanya mendanai gaji guru Agama Islam dan lembaga yang menyediakan pelatihan guru Agama Islam. Perbedaan kebijakan pendanaan sekolah Islam ini tidak dapat dilepaskan dari kriteria pendanaan publik dan perbedaan sistem sekolah secara umum. Di Swedia dan di Belanda, misalnya, semua sekolah Islam adalah *Co-education* dan ini dianggap serupa dengan sekolah mainstream lainnya. Di Inggris dan Prancis terdapat sekolah memisahkan jenis kelamin. Namun Inggris dan Prancis mendanai sebagian sekolah Islam swasta dengan syarat telah memenuhi standar pendidikan nasional. Karena telah memasukkan pendidikan Agama Islam di sekolah umum, Jerman hanya mendanai guru-guru Agama Islam, tetapi tidak bagi sekolah-sekolah Islam swasta.

Perbedaan sistem yang diterapkan di sekolah Islam dapat mempengaruhi kebijakan pendanaan pendidikan oleh pemerintah. Dengan demikian, tidak mungkin berbicara tentang sekolah-sekolah Islam yang didanai negara dalam istilah-istilah yang homogen, baik secara global maupun nasional. Di satu sisi, kemunculan sekolah-sekolah Islam yang didanai negara dan PAI di Eropa, dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan pendidikan yang sama bagi umat Islam dan minoritas agama lainnya,

<sup>58</sup> Jenny Berglund, "Global Questions in the Classroom: The Formulation of Islamic Religious Education at Muslim Schools in Sweden," *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education* 32, no. 4 (2011): 497–512.

<sup>59</sup> Jenny Berglund, *Teaching Islam, Islamic Religious Education in Sweden* (Munster: Waxman, 2010), 27.

<sup>60</sup> Bill Gent, "Teaching Islam: Islamic Religious Education in Sweden," *Intercultural Education* 22, no. 3 (June 2011): 223–224, accessed December 7, 2018, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14675986.2011.592037>.

melalui kemitraan dengan negara.<sup>61</sup> Di sisi lain, dana publik dapat dipahami sebagai sarana menjinakkan Islam dengan membawanya ke dalam kerangka Eropa. Dengan menawarkan pendidikan agama Islam yang didanai publik, maka dapat dipandang sebagai upaya mengendalikan umat Islam.

**Tabel 1. Kebijakan Sekolah Islam di Lima Negara Eropa**

Negara	Pendanaan	Kurikulum	Guru
Belanda	Semua sekolah Islam, dengan syarat telah memenuhi standar pendidikan nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diserahkan kepada sekolah masing-masing.</li> <li>• Materi: ayat-ayat Al-Qur'an, Pilar Islam, cerita keagamaan yang mengajarkan nilai-nilai moral.</li> <li>• Buku agama menggunakan Bahasa Belanda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada pendidikan guru PAI</li> <li>• Guru PAI mengikuti pelatihan/pendidikan guru bersertifikat di universitas.</li> </ul>
Inggris	Hanya sekolah yang mengikuti kurikulum nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAI diberikan di sekolah publik</li> <li>• Materi PAI diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional: Al-Qur'an, bahasa Arab, dan Studi Islam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pendidikan guru PAI</li> <li>• Guru PAI wajib mengikuti kursus ilmu pendidikan setingkat pascasarjana</li> </ul>
Jerman	Gaji guru dan universitas penyelenggara program studi Teologi Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diberikan di sekolah umum dengan waktu 2 jam/minggu</li> <li>• Kajian Al-Quran, sejarah Islam, perbandingan agama dan etika keislaman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pendidikan guru PAI</li> <li>• Guru PAI harus belajar Teologi Islam di Universitas</li> </ul>
Prancis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian sekolah Islam yang mengikuti kurikulum nasional</li> <li>• Beroperasi minimal 5 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada PAI di sekolah publik</li> <li>• PAI diintegrasikan dalam mata pelajaran lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pendidikan guru PAI</li> <li>• Guru PAI wajib mengambil mata kuliah pilihan tentang topik agama, bukan khusus agama Islam.</li> </ul>
Swedia	Semua sekolah Islam, tapi harus mengikuti kurikulum nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan sekolah masing-masing, tapi menganut nilai-nilai dasar kurikulum nasional.</li> <li>• Bahan ajar PAI berbahasa Swedia belum ada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pendidikan guru PAI.</li> <li>• Guru PAI wajib mengambil kuliah ilmu pendidikan</li> </ul>

Dukungan pendanaan untuk sekolah Islam dan pelajaran PAI di sekolah umum oleh negara-negara Eropa tentu memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk mengurangi perilaku diskriminatif dan meningkatkan integrasi budaya Islam dan Barat. Namun, apapun tujuannya, negara-negara ini telah menampakkan kepeduliannya terhadap penduduknya yang minoritas, yaitu Muslim, khususnya terkait

<sup>61</sup> Jonathan Laurence, *The Emancipation of Europe's Muslims: The State's Role in Minority Integration* (Princeton: Princeton University Press, 2012), 249.

dengan pendidikan agama Islam. Dengan dukungan dana pemerintah kaum Muslim tidak hanya terakui sejajar dengan warga negara lainnya, tetapi juga dapat dengan leluasa mengembangkan pendidikan Islam di masa mendatang.

Sebagaimana kebijakan dukungan pendanaan sekolah Islam, pemerintah lima negara Eropa menerapkan kebijakan pengajaran PAI secara beragam. Jerman secara revolusioner telah memasukkan pelajaran agama Islam dalam sekolah-sekolah umum, yang sampai sekarang menjangkau 800 sekolah dasar dan menengah;<sup>62</sup> sama halnya dengan Inggris. Namun otoritas Inggris justru melarang sekolah-sekolah hanya mengajarkan agama dan memisahkan siswa berbasis jenis kelamin. Belanda dan Swedia meyerahkan kurikulum PAI kepada masing-masing sekolah Islam. Sedangkan Prancis tidak mengizinkan PAI di sekolah publik, tetapi pelajaran tentang agama diintegrasikan ke dalam matapelajaran lain.

Secara umum lima pemerintah negara-negara Eropa ini relatif bersifat netral mengenai isi pelajaran PAI dan oleh karenanya materi PAI diserahkan pada sekolah dan guru masing-masing. Hal ini memungkinkan interpretasi beragam tentang materi keislaman. Di beberapa sekolah Islam, PAI sering menggunakan bentuk musik kontemporer (misalnya, halal-pop) untuk meningkatkan kualitas pengajaran, sedangkan di sekolah lain, semua bentuk musik instrumental sepenuhnya dilarang. Netralitas negara terhadap pendidikan agama berkisar pada entitas yang bertanggung jawab menentukan konten, mengembangkan kurikulum, memilih bahan, dan melatih para guru agama. Pemberian PAI di sekolah umum di Jerman diarahkan untuk meningkatkan pemahaman tradisi-tradisi keagamaan lain bagi warga Jerman, bukan untuk meningkatkan kepercayaan pada agama Islam. Sedangkan PAI di sekolah umum Prancis diintegrasikan dalam kajian-kajian non-PAI misalnya studi budaya. Tujuan ini, di satu sisi, memperluas kemungkinan bagi warga Jerman dan Prancis untuk memahami Islam, tetapi di sisi lain dapat tidak sinkron dengan tujuan pendidikan agama Islam yang utamanya adalah meningkatkan kepercayaan terhadap Islam dan menjalankan ajaran-ajarannya. Selain itu, menawarkan PAI pada kurikulum nasional, secara tidak langsung mendorong interpretasi terhadap Islam atau agama lain agar sesuai dengan modernitas Barat.<sup>63</sup> Pengajaran PAI di Jerman dan Prancis dapat dikatakan menggunakan pendekatan ilmiah, dan bukan konfesional. Pengajaran untuk pengakuan atas kebenaran agama Islam dilaksanakan di sekolah Islam swasta, masjid-masjid, dan organisasi keagamaan Islam.

Perbedaan kebijakan pendanaan dan kurikulum PAI berkorelasi dengan perbedaan kebijakan terhadap pemberdayaan guru-guru agama Islam di lima negara Eropa ini. Belanda mewajibkan guru-guru agama Islam mengikuti pelatihan guru bersertifikat di universitas yang menyediakan pendidikan guru PAI. Sertifikasi guru di sekolah Islam merupakan upaya pemerintah untuk mensejajarkan kualitas

<sup>62</sup> Andes Septa, "800 Sekolah Umum Di Jerman Buka Kelas Agama Islam," *IDN Times*, last modified November 4, 2018, accessed October 26, 2019, <https://www.idntimes.com/news/world/andes-3/800-sekolah-umum-di-jerman-buka-kelas-agama-islam-c1c2-1/full>.

<sup>63</sup> Thomas S. Popkewits, "Curriculum Study, Curriculum History and Curriculum of Reason," *Journal of Curriculum Studies* 41, no. 3 (2009): 302–309.

guru PAI dengan guru-guru non-PAI. Inggris dan Swedia tidak menyelenggarakan pendidikan guru PAI. Namun semua guru PAI di dua negara ini diwajibkan mengikuti kursus ilmu pendidikan setingkat pascasarjana untuk meningkatkan kemampuan pedagogik mereka. Kemampuan akademik PAI diperoleh dari kuliah-kuliah di negara lain. Keterpaduan dua kemampuan ini membuat guru tersertifikasi sebagai guru PAI profesional. Jerman dan Prancis sama-sama tidak menyediakan pendidikan guru PAI secara khusus. Namun, guru-guru Agama di Prancis diharuskan mengambil matakuliah yang memuat tentang topik agama, dan di Jerman mengambil kuliah teologi Islam. Ini mengindikasikan bahwa pembelajaran PAI lebih mengarah pada kajian historis tentang Islam daripada substansi PAI itu sendiri. Lima negara Eropa ini mengharuskan guru memiliki kemampuan profesional yang menggabungkan antara kemampuan akademik dan kemampuan pedagogis, meskipun tempat pelatihan mereka berbeda-beda.

#### **E. Penutup**

Negara-negara di Eropa memiliki kebijakan terkait sekolah Islam yang berbeda-beda. Penyediaan dana pada sekolah Islam, di satu sisi, merupakan implikasi dari kewajiban negara untuk memberikan persamaan hak atas pendidikan dan rasa keadilan bagi seluruh warga negara. Di sisi lain, pendanaan negara dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan pendidikan Islam. Meskipun pendanaan sekolah Islam yang mensyaratkan kepatuhan terhadap sistem pendidikan mainstream adalah wajar, mekanisme ini dapat mengurasi kebebasan sekolah Islam dalam menjalankan misi-misi utama mereka. Namun, pemberian dana mengindikasikan kepedulian negara terhadap sekolah Islam dan membuatnya mampu beroperasi secara sejajar dengan sekolah-sekolah lain.

Kurikulum di sekolah merupakan media yang paling efisien dalam menanamkan nilai-nilai yang berlaku di suatu negara. Maka, sangat rasional apabila suatu negara yang mendanai lembaga pendidikan memiliki kepentingan terhadap kurikulum yang diajarkan, termasuk pendidikan agama. Negara-negara Eropa telah mengizinkan PAI di sekolah umum dengan tujuan untuk mengenalkan Islam pada warga negara setempat sehingga mengurasi sentimen negatif terhadap Islam. Untuk tipe ini, pendidikan agama Islam lebih dimaknai sebagai kajian historis-akademik, khususnya bagi siswa non-Muslim. Namun bagi Muslim, ini tidak hanya memberikan telaah Islam secara kritis, tapi juga sebagai penguatan pemahaman tentang Islam. Dalam konteks ini guru PAI dapat menjadi agen tidak langsung kebijakan suatu negara terhadap agama. Untuk sekolah Islam, negara-negara Eropa menyerahkan konten PAI sepenuhnya kepada sekolah dan guru PAI. Oleh karenanya, materi-materi PAI tidak hanya meningkatkan pemahaman sumber dan ajaran Islam, tetapi juga memperkuat keyakinan dan memperkokoh pelaksanaan ajaran-ajarannya.

Sebagaimana guru matapelajaran lainnya, guru PAI di sekolah umum dan guru-guru di sekolah Islam dituntut untuk memenuhi standar profesionalitas. Oleh karenanya, guru PAI diharuskan menguasai ilmu pedagogis baik yang diperoleh dari universitas maupun pusat-pusat pelatihan keguruan. Profesionalitas guru PAI sangat dibutuhkan di Eropa supaya memberikan pendidikan yang berkualitas bagi warga negara. Dengan pelatihan yang diprakarsai oleh negara guru PAI dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk mengontrol konten dan arah pendidikan Islam.

Sekolah Islam semakin berkembang di beberapa negara Eropa dan mendapat dukungan dana dari pemerintah setempat asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Beberapa negara juga telah memasukkan PAI dalam kurikulum sekolah umum dan memberikan pelatihan khusus bagi guru PAI. Perkembangan ini positif dalam peningkatan interaksi lintas agama dan negara, sehingga memungkinkan tercapainya relasi harmonis antar bangsa. Kajian ini memberikan kontribusi pemahaman tentang kemajuan pendidikan Islam di negara-negara non-Muslim bahkan negara-negara sekuler dan peran pemerintah setempat dalam mendukung sekolah Islam dan pendidikan agama Islam. Kajian ini hanya melibatkan lima negara di Eropa. Kajian serupa dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak negara, sehingga didapatkan kesimpulan yang lebih konklusif tentang kebijakan pendidikan agama Islam di negara-negara non-Muslim.

## F. Referensi

- Aminuddin, Choirul. *Tempo.Co*. December 3, 2017. <https://dunia.tempo.co/read/1039128/populasi-muslim-swedia-paling-tinggi-di-eropa>. (accessed September 7, 2018).
- Aslan, Ednan. *Islamic Education in Europe*. Vienna: Bohlau Verlag, 2009.
- Avest, Ina. *Religion and Education in the Dutch and Post Pillarized Educational System*. Munster: Waxmann, 2007.
- Barou, Jacques. "Integration of Imigrant in France: A Historical Perspective." *Identities: Global Studies in Culture and Power*, 2014: 643.
- Basdevant, Brigitte. *Islam in France, in the Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*. Lauven: Peeters, 2004.
- . *Islam in France, in the Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*. Lauven: Peeters, 2004.
- Beraud, Velinger. *Religion and Education in the France and Spanish*. France: Distant Cousins, 2008.
- Berglund, Jenny. "Global Questions in the Classroom: The Formulation of Islamic Religious Education at Muslim Schools in Sweden." *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 2011: 497–512.
- . *Singing and Music: A Multifaceted and Controversial Aspect of Islamic Religious Education in Sweden*. London: Bloomsbury, 2014.
- . *Teaching Islam, Islamic Religious Education in Sweden*. Munster: Waxman, 2010.
- Birt, Jonathan. *Good Iman, Bad Iman: Civic Religion and National Integration in Britain Post 9/11*. London: The Muslim World, 2006.

- Borevi, Karin. "Multiculturalism and Welfare State Integration: Swedish Model Path Dependency." *Journal Global Studies in Culture and Power*, 2014: 115–117.
- Breen, Damian. *State Funded Muslim Schools: Stakeholders and Legitimacy in the UK Context*. Abingdon: Routledge, 2013.
- Casari, Joselyne. *When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States*. New York: Plgrave Macmillan, 2004.
- Schiffauer, Werner, et.al. *Civil Enculturation, Nation-State, School and Ethnic Difference in Four European Countries*. Oxford: Berghan Books, 2004.
- EUMC. *Muslims In The European Union Discrimination and Islamophobia*. Austria: Manz Crossmedia, 2006.
- Fuad, Ahmad Nur. *Minoritas Muslim Di Negara-Negara Non Muslim*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Geaves, Ron. "Negotiating British Citizenship and Muslim Identity." In *Muslim Britain Communities under Pressure*, by Tahir Abbas. London: Zed Books, 2005.
- Gent, Bill. "Teaching Islam: Islamic Religious Education in Sweden." *Intercultural Education*, 2011: 223–224.
- Gleason, Nancy W. *Higher Education In The Era Of The Fourth Industrial Evolution*. Singapore: Springer Nature Singapore Ltd., 2018.
- Hackett, Michael Lipka and Conrad. *Pew Research Center*. April 6, 2017. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group/>. (accessed September 7, 2018).
- Halstead, J. Mark. "Islamic Education in the United Kingdom." In *Islamic Education in Europe*, by Aslan Ednan, 179. Vienna: Bohlau Verlag, 2009.
- Joppke, Chistian. "Beyond National Models: Civic Integration Policies for Immigrants in Western Europe." *Journal Western European*, 2007: 1.
- Josza, Paul. *Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates*. Munster: Waxman, 2007.
- Koningsveld, P. Sj. van. *The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe*. Kampen: Kok Pharos Pub. House, 1991.
- Laurence, Jonathan. *The Emancipation Od Europe's Muslims: The State's Role in Minority Integration*. Princenton: Princenton University Press, 2012.
- Mandavile, Peter. *Islamic Education in Britain*. Boston: Brill, 2004.
- Martensson, Ulrika. "Public Islam and the Nordic Welfare State: Changing Realities?" *Journal Tidsskrift for Islamforskning*, 2014: 4.
- Mauleman, Johan. *Islamic and Education in the Netherlands*. Munster: Waxmann, 2009.
- Meijer, Wilna A.J. *Tradition and Future of Islamic Education*. Munster: Waxmann, 2009.
- Merry, Geert Driessen and Michael S. "Islamic School in the Netherlands: Expansion or Marginalizations?" *Journal of Interchange*, 2006: 30–34.
- Meuleman, Johan. "Islam and Education in the Netherlands." In *Islamic Education in Secular Societies*, by Ednan Aslan and Margaret Rausch, 143–161. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.



- Nabel, Muhammad. "Schooling Options for Muslim Children Living in Muslim Minority Countries." *Journal of Social Science and Humanities Research*, 2015: 23–26.
- Nelsen, Jorgen S. *Muslims in Western Europe, Second Edition*. England: Edinburgh University Press, 1995.
- Otterbeck, Jonas. "What Is a Reasonable Demand? Islamic in Swedish Textbooks." *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2005: 795–812.
- Pepin, Luce. *Teaching About Religions in European School Systems: Policy Issues and Trends*. London: Alliance Publishing Trust, 2009.
- Popkewits, Thomas S. "Curriculum Study, Curriculum History and Curriculum of Reason." *Journal of Curriculum Studies*, 2009: 302–309.
- poskotanews.com. *poskotanews*. March 7, 2018. <http://poskotanews.com/2018/03/07/pertumbuhan-muslim-di-eropa-meningkat-dua-kali-lipat>. (accessed November 13, 2018).
- Qasim, Robert Hefner and Muhammad. *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*. New Jersey: Princeton University Press, 2007.
- Refai (Al), Christopher Bagley and Nader. "Citizenship Education: A Study of Muslim Students in Ten Islamic and State Secondary Schools in Britain." In *Reforms in Islamic Education: International Perspectives*, by Charlene Tan, 53–56. London: Bloomsbury Academic, 2014.
- Rohe, Mathias. *The Legal Treatment of Muslims in Germany*. Germany: Leuven Peters, 2004.
- S., Geert Driessen Michael. "Islamic School in the Netherlands: Expansion or Marginalization?" *Journal of Interchange*, 2006.
- Sarikaya, Yasar. *Islamic Religious Education in Germany: Curriculum and Textbooks*. Frankfurt: Peter Lang, 2011.
- Schreiner, Peter. "Religious Education in Germany." In *Religious Education in Europe: Situation and Current Trends in Schools*, by E. Kuyk, 81–82. Oslo: IKO - Publishing House, 2007.
- Schreiner, Peter. "Religious Education in the European Context." In *Issues in Religious Education*, by Lynne Broadbent and Alan Brown, 87. New York: Routledge, 2002.
- Shaikh, Susan L. Douglass and Munir A. "Defining Islamic Education: Differentiation and Applications." *Current Issues in Comparative Education*, 2004: 5–18.
- Septa, Andes. "800 Sekolah Umum Di Jerman Buka Kelas Agama Islam," *IDN Times*, November 4, 2018. <https://www.idntimes.com/news/world/andes-3/800-sekolah-umum-di-jerman-buka-kelas-agama-islam-c1c2-1/full> (accessed October 26, 2019).
- Skeie, Geir. *Plurality and Pluralism in Religious Education*. Dordrecht: Springer, 2006.
- Statistics, Office for National. *Office for National Statistics*. <https://www.ons.gov.uk/aboutus/transparencyandgovernance/freedomofinformationfoi/muslimpopulationintheuk>. (accessed November 7, 2018).
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Tang, Suardi Wekke and Ambo. "Kultur Pendidikan Islam Di Minoritas Muslim Inggris." *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 2016.
- Thobani, Shiraz. *Vision in the National Curriculum: Muslim History in the British Education Context*. London: Tauris, 2010.
- UK, Centre for the Study of Islam in the *Cardiff University*. December 2, 2015. <https://sites.cardiff.ac.uk/islamukcentre/rera/online-teaching-resources/muslims-in-britain->

online-course/module-3-communities/diversities/muslim-ethnicities/ (accessed October 7, 2018).

Vaisse, Jonathan Laurence and Justin. *Integrating Islam: Political and Religious Challenges in Contemporary France*. France: Brookings Institution Press, 2007.

Wingerden, Rietveld Van. *Islam in Education in the Netherlands*. Munster: Waxmann, 2010.

Yasar, Aysun. *Islamic Instruction at Public Schools in Germany: Expectations and Challenges*. Frankfurt: Peter Lang, 2013.